



Distorsi Prinsip “*Mantenere Lo Stato*” Dalam Pemikiran Realisme Politik Niccolò Machiavelli Melalui Fenomena Dinasti Politik

Muhammad Choirul Yusuf

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman, Indonesia

Email Korespondensi: muhammady210521@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze and elaborate on the phenomenon of political dynasties in Indonesia through the prism of Niccolò Machiavelli's political realism. Machiavellian realism, grounded in pessimistic political anthropocentrism and the principle of *necessità* (necessity), radically declares the autonomy of power from normative morality, making "*mantenere lo stato*" (maintaining the state or power) the sole political imperative. In the context of political dynasties, this realism provides an explanatory framework for the instrumental maneuvers undertaken by political actors. Political dynasties are seen as manifestations of a strategic combination of *virtù* (the political skill of kinship) in acquiring and exploiting political modalities, and *fortuna* (the structural opportunities, such as regulatory loopholes or electoral momentum) to secure the succession to power. The research method employed by the researcher was library research and a comparative study with a qualitative approach. The results of this study provide arguments demonstrating that political dynasties can be legally and formally legitimized in a democratic system. Thus, ethically and philosophically, they reflect the continuity of Machiavellian logic, which prioritizes the public interest for the perpetuation of group power. This study explores the ethical implications of political law and the potential degeneration of democracy due to the instrumentality of power.

Keywords: Machiavellianism, Political Realism, Political Dynasty, Autonomy of Power.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi fenomena dinasti politik di Indonesia melalui prisma realisme politik Niccolò Machiavelli. Realisme Machiavellian yang berpijak pada antroposentrisme politik dengan corak pesimistik dan prinsip *necessità* (kebutuhan), secara radikal mendeklarasikan otonomi kekuasaan dari moralitas normatif, menjadikan *mantenere lo stato* (mempertahankan negara atau kekuasaan) sebagai imperatif tunggal politik. Dalam konteks dinasti politik, realisme ini memberikan kerangka eksplanatif terhadap manuver instrumental yang dilakukan oleh para aktor politik. Dinasti politik dipandang sebagai manifestasi penggabungan strategis antara *virtù* dalam hal kecakapan politis kekerabatan dalam mengakuisisi dan memanfaatkan modalitas politik dan *fortuna* dalam hal peluang struktural, seperti celah regulasi atau momentum elektoral untuk mengamankan suksesi kekuasaan. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah library research dan studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan argumentasi yang menunjukkan bahwa dinasti politik dapat dilegitimasi secara legal-formal dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, secara etis dan filosofis mencerminkan keberlanjutan logika Machiavellian yang mengesampingkan kepentingan

umum demi perpetuasi kekuasaan golongan. Kajian ini mendalami implikasi etika politik-hukum dan potensi degenerasi demokrasi akibat instrumentalitas kekuasaan.

Kata Kunci: *Machiavellianisme, Realisme Politik, Dinasti Politik, Otonomi Kekuasaan.*

PENDAHULUAN

Revolusi pemikiran politik yang diinisiasi oleh Niccolò Machiavelli melalui magnum opusnya, *Il Principe* (1532), bukan sekadar sebuah traktat nasihat kepada penguasa, melainkan sebuah deklarasi epistemologis yang memisahkan ranah politik dari dominasi etika dan teologi skolastik. Karya ini menandai transisi ke modernitas dalam filsafat politik dengan menetapkan politik sebagai disiplin independen secara khusus (*sui generis*), diatur oleh logika internal kekuasaan itu sendiri. Pandangan Machiavelli yang memisahkan yang aktual dari yang ideal telah memicu perdebatan abadi mengenai moralitas dalam tindakan publik, sebuah perdebatan yang relevan hingga kini, terutama dalam konteks praktik politik kontemporer di negara-negara yang berada dalam transisi demokratis, termasuk Indonesia.

Kondisi Negara Indonesia saat pasca reformasi mengalami desentralisasi politik yang masif. Namun, euforia demokrasi lokal tereduksi oleh munculnya fenomena yang disebut Dinasti Politik di berbagai tingkatan pemerintahan, baik dari tatanan daerah maupun pusat. Fenomena ini ditandai oleh konsentrasi dan pewarisan jabatan publik di tangan segelintir keluarga atau oligark, yang mana seringkali menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keotentikan dari meritokrasi di ruang lingkup politik dan prinsip kesetaraan kesempatan dari suatu kontestasi politik (Tanuri, dkk, 2024). Kendati dinasti politik dianggap legal dalam kerangka konstitusional dengan tidak adanya larangan atas relasi kekerabatan, tetapi secara substansial dapat merusak sirkulasi elit dan menggerus kepercayaan publik terhadap proses politik yang adil (Parto, dkk, 2025). Konstitusi tidak membatasi setiap orang untuk terjun dalam politik praktis. Namun, model politik dinasti menegaskan tidak adanya zona kontestasi yang equal dengan eksistensi *dirty hands* di balik prosesnya (Rahma, dkk, 2023).

Penelitian ini menekankan bahwa realisme politik Machiavelli berfungsi sebagai lensa eksplanatif yang kuat untuk memahami dan mengkritisi logika operasional Dinasti Politik di tatanan suatu negara (Hadiz & Robison, 2017). Dinasti politik dapat dimaknai sebagai upaya maksimal bagi penguasa di era kontemporer untuk mewujudkan konsep *virtù* dan *fortuna* Machiavellian. Keluarga politik menggunakan *virtù* dengan berbagai modalitas intrinsik mencakup (kapasitas politis, modal jaringan, dan kecakapan instrumental) untuk memanfaatkan *fortuna* (peluang elektoral, regulasi yang permisif, dan kerentanan publik) guna mengamankan kekuasaan dan menjadikan pengaruhnya bersifat *long lasting*. Sehingga dapat dipahami bahwa relevansi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk melampaui kritik normatif yang banal dan menyajikan analisis filsafat dalam ruang lingkup politik-hukum yang mendalam. Dengan meninjau dinasti politik melalui kacamata realisme Machiavellian, sekiranya dapat mengidentifikasi akar instrumentalitas kekuasaan, yang mana bukan hanya sebagai gejala disfungsi

demokrasi, melainkan standar moralitas penguasa yang cenderung berbeda daripada masyarakat.

METODE

Kajian ini dirancang secara sistematis melalui metode penelitian kualitatif yang bersandar penuh pada studi kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan data primer berpusat pada analisis mendalam terhadap teks-teks fundasional dalam filsafat politik, khususnya *magnum opus* Niccolò Machiavelli, yakni *Il Principe*. Data sekunder dalam penelitian berfungsi dalam memperkaya perspektif peneliti, yang mana diperoleh dari serangkaian literatur ilmiah kontemporer, meliputi jurnal akademik, buku referensi, dan kajian kritis mengenai realisme politik, etika publik, dan dinamika kekuasaan dalam konteks dinasti politik di Indonesia. Inti dari analisis ini adalah pendekatan filosofis yang dikombinasikan dengan analisis konseptual kritis. Pendekatan ini berfungsi ganda: pertama, sebagai alat analisis genealogis, yang mana berupaya mendekonstruksi makna asli dari trias konsep Machiavellian (*virtù*, *fortuna*, dan *necessità*) untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut beroperasi dalam praktik politik nyata, bukan sekadar dalam teori. Kedua, pendekatan ini berperan sebagai kajian kritis-eksplanatif, menggunakan kerangka realisme Machiavellian sebagai lensa untuk menjelaskan secara mendalam ‘mengapa’ fenomena dinasti politik dapat mengakar dan bertahan dalam sistem demokrasi, alih-alih hanya berfokus pada penghakiman moral atau normatif. Dengan demikian, kajian ini melakukan sintesis etis-hukum dengan merefleksikan prinsip otonomi kekuasaan Machiavelli terhadap idealisme demokrasi, meninjau implikasi filosofis dari legalitas formal suatu praktik kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Antroposentris Politik Machiavelli Terhadap Politik Dinasti Melalui Prinsip Necessità dan Deklarasi Otonomi Kekuasaan

Pembedaan Machiavelli antara politik dan moralitas bermula dari pandangannya yang tegas dan tanpa ilusi terhadap kodrat manusia. Dalam tradisi filsafat politik klasik (Plato dan Aristoteles), manusia dipandang sebagai *zoon politikon* yang berorientasi pada *summum bonum* (kebaikan tertinggi). Machiavelli menolak keras pandangan idealis tersebut. Baginya, manusia harus dipandang sebagaimana adanya (*come si vive*) daripada sebagaimana yang seharusnya (*come si dovrebbe vivere*). Pandangan antroposentris Machiavelli dimensi politik bersifat pesimistik, dengan pemaknaan bahwa manusia pada dasarnya ambisius, serakah, mudah ingkar janji, dan cenderung bertindak sebagai egoistik yang sempurna daripada memikirkan kepentingan komunal. Klaim terkait sifat kodrati manusia dalam persepsi Machiavelli bertumpu pada pengalaman empirisnya di Florence. Dalam Bab XVII karya *Il Principe*, Machiavelli menetapkan premis bahwa “cinta diikat oleh rantai kewajiban, sedangkan rasa takut tidak akan pernah gagal”, dengan demikian memberikan pemaknaan tentang figur penguasa yang lebih baik ditakuti daripada dicintai (Machiavelli, 1991). Dengan demikian, kekuasaan tidak dapat

dibangun di atas fondasi cinta kasih atau itikad baik semata, karena sifat-sifat manusia tersebut terlalu fluktuatif dan tidak dapat diandalkan.

Dari pandangan pesimistiknya, lahir prinsip *necessità* (kebutuhan atau keharusan). *Necessità* menjadi kekuatan pendorong yang membenarkan setiap tindakan penguasa, termasuk yang dianggap represif, selama tujuannya adalah untuk mempertahankan stabilitas negara (*mantenere lo stato*). Jika manusia didominasi oleh naluri keegoisan bagaikan serigala, maka seorang penguasa harus menjadi rubah dan singa sekaligus. Personifikasi manusia layaknya serigala sama halnya dengan adagium yang dikemukakan Hobbes yaitu "*Homo homini lupus*" atau "manusia adalah serigala bagi manusia lainnya". Figur penguasa harus memiliki personifikasi rubah dengan bekal kemampuan licik untuk mengenali jebakan sekaligus personifikasi singa yang dapat membenamkan rasa takut pada serigala. Figur penguasa yang didorong oleh *necessità* untuk mengamankan kekuasaan tidak memiliki kebutuhan untuk "bersikap baik" berdasarkan standard moral pada umumnya, dalam hal kebaikan itu justru berpotensi mendekonstruksi tatanan politiknya. Inilah yang secara esensial mendeklarasikan otonomi penuh politik dari etika konvensional.

Aliran realisme Machiavelli mencapai puncaknya melalui deklarasi otonomi politik. Machiavelli adalah filsuf politik pertama yang secara eksplisit membebaskan tindakan politik dari batasan etika teosentris dan normatif. Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan moralitas, tetapi untuk menciptakan standard etika politik baru, yang mana tolok ukur moralitas diukur dari keberhasilan atau kegagalan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara (Rambe, 2008). Dalam kerangka ini, Machiavelli mengklaim bahwa "yang baik adalah apa saja yang memperkuat kekuasaan penguasa" (Machiavelli, 1991). Tindakan yang merefleksikan betapapun brutalnya, akan dianggap mulia jika berhasil mencapai tujuan ini. Pemisahan ini memungkinkan kekuasaan untuk berfungsi sebagai entitas instrumental, yang berarti bahwa segala sumber daya dan strategi, termasuk oligark dan garis keturunan, dapat direduksi menjadi alat untuk tujuan tunggal, yakni perpetuasi kekuasaan (Suhartini, dkk, 2025).

Dalam otonomi politik terdapat suatu konsep yang dikenal sebagai "*mantenere lo stato*", melampaui sekadar menjaga wilayah, tetapi mencakup menjaga stabilitas internal dan eksternal. Apabila stabilitas tersebut terancam, baik oleh ancaman asing maupun intrik domestik, penguasa memiliki hak beserta kewajiban (*necessità*), untuk bertindak di luar batas hukum positif atau moralitas sosial. Otonomi inilah yang menjadi jembatan filosofis untuk menganalisis dinasti politik. Jika kekuasaan adalah tujuan tertinggi, maka segala cara untuk mengamankan dan meneruskannya (seperti suksesi kekerabatan) menjadi rasional dan dibenarkan dalam logika politik itu sendiri (Atu, 2024).

Dialektika Antara Virtù Sebagai Kecakapan Instrumental dan Fortuna sebagai Legislative Opportunity Dalam Realitas Dinasti Politik

Dalam filsafat politik Machiavelli, *virtù* menjadi konsep kunci yang sering disalahartikan. Berbeda dengan terjemahan literalnya sebagai "kebajikan" atau "moralitas" (yang mengacu pada tradisi Romawi kuno). *Virtù* yang dimaksud

Machiavelli adalah kapasitas, energi, dan kecakapan politis seorang penguasa untuk bertindak tegas, beradaptasi, dan menggunakan perhitungan yang cermat, bahkan represivitas sekalipun untuk mencapai tujuan politik. Dalam konteks dinasti politik, *virtù* dalam kekerabatan diartikan sebagai *political capital* yang berhasil diakumulasi oleh oligark yang berkuasa. *Virtù* ini terdiri dari:

1. Modal Jaringan (*Network Capital*): Koneksi dengan birokrasi, aparat penegak hukum, dan elit partai politik yang telah dibangun dan diuji oleh pendahulu di kursi politik.
2. Modal Elektoral (*Electoral Capital*): Popularitas yang diwariskan atau mudah ditransfer, serta “alat” pemenangan yang terstruktur dan terbiayai.
3. Modal Instrumental (*Pragmatic Competence*): Kemampuan untuk memilih waktu yang tepat untuk mencalonkan diri, merekayasa dukungan, dan menetralkan oposisi, yang mana menjadi manifestasi murni dari kecakapan politik Machiavellian.

Dinasti politik adalah upaya oligark untuk mentransfer *virtù* yang telah teruji dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga untuk memperluas jangkauan dan memperkuat hegemoni politik keluarga di berbagai institusi negara. Jika *virtù* adalah energi aktif yang dikendalikan penguasa, maka *fortuna* adalah kekuatan pasif, yakni ketidakpastian, momentum, atau peluang yang datang secara acak. Machiavelli membandingkan *fortuna* dengan sungai yang meluap, manusia yang memiliki *virtù* akan membangun tanggul (persiapan) saat keadaan tenang untuk memitigasi risiko saat banjir datang. Dalam konteks dinasti politik di Indonesia, *fortuna* dapat diinterpretasikan sebagai:

1. Peluang Regulatif: Perubahan undang-undang atau peraturan daerah (Perda) yang membuka celah bagi kerabat untuk maju, atau, sebaliknya, kebijakan yang secara strategis membatasi lawan politik. Kasus paling signifikan adalah peluang yang tercipta dari revisi atau reinterpretasi regulasi elektoral, yang seringkali menjadi momen krusial yang dimanfaatkan oleh oligark (Budi, 2024).
2. Momentum Elektoral: Ketidakpuasan publik terhadap oposisi, atau popularitas tak terduga yang diwariskan dari anggota keluarga sebelumnya. *Fortuna* di sini adalah kondisi politik-sosial yang dimanfaatkan secara jitu oleh *virtù* politik dinasti. Jika *fortuna* menyediakan momentum, *virtù* menyediakan infrastruktur kampanye dan modal finansial yang diperlukan untuk memenangkan momentum tersebut (Fitriyah, 2020).
3. Fragmentasi Elit: Perpecahan di antara elit politik di luar keluarga penguasa, yang menciptakan ruang kosong kekuasaan yang secara efisien diisi oleh anggota dinasti politik. Hal tersebut merupakan *fortuna* yang harus dengan cepat dikuasai atau dikendalikan oleh *virtù* oligark.

Dialektika *virtù* dan *fortuna* menjelaskan mengapa dinasti politik dapat bertahan. Bukan hanya karena mereka memiliki modalitas intrinsik, tetapi karena mereka memiliki kecakapan adaptif (*virtù*) untuk membaca dan memanfaatkan celah regulasi dan kepuasan publik terhadap petahana (*fortuna*) (Wimmy & Hakim, 2020). Keluarga politik yang gagal adalah mereka yang memiliki modalitas

melimpah, tetapi tidak memiliki *virtù* untuk beradaptasi terhadap *fortuna* yang berubah secara dinamis dengan *window of opportunity* yang sempit.

Realisme Machiavelli mengajarkan bahwa kekuasaan dalam manifestasi murninya bersifat instrumental. Jabatan publik dari kursi legislatif hingga eksekutif, direduksi statusnya dari amanah publik menjadi alat untuk memperkuat basis kekuasaan oligark. Dalam logika Machiavellian, penempatan kerabat dalam jabatan strategis adalah tindakan rasional, didorong oleh *necessità* untuk mengeliminasi risiko pengkhianatan dan memastikan loyalitas mutlak dalam lingkaran kekuasaan. Penguasa lebih mengandalkan orang yang loyal (kerabat) daripada orang yang sekadar kompeten (non-kerabat) tetapi berpotensi menjadi ancaman (Vano, 2024). Instrumentalitas ini menciptakan fenomena "oligarki kekuasaan," yang mana otoritas formal dari jabatan publik disandingkan dengan otoritas informal dengan basis garis keturunan (Vano, 2024). Dampak hukumnya adalah erosi terhadap prinsip *equality before the law* dan *merit system* dalam birokrasi, karena loyalitas dengan sumber pertalian darah dan kekerabatan menggantikan kompetensi dan profesionalisme individu.

Degradasi Nilai Demokrasi dan Konsekuensi Terhadap Stabilitas Politik Sebagai Implikasi Dinasti Politik

Jika realisme Machiavelli dilegitimasi sebagai logika operasional dinasti politik, maka implikasi etis terhadap demokrasi menjadi sangat krusial. Demokrasi secara ideal bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan sirkulasi elit yang sehat. Kendati dinasti politik sering kali lolos secara prosedur legal, tetapi secara etis merusak fondasi demokrasi yang difantasikan penuh dengan integritas (Susanti, 2017). Implikasi dalam sektor publik akan terjadi erosi meritokrasi. Penempatan kerabat dalam jabatan publik menunjukkan substitusi antara *virtù* oligark dengan *virtù* individu (kompetensi). Hal ini mengirimkan sinyal bahwa jalur menuju kekuasaan lebih ditentukan oleh koneksi pertalian darah dan modalitas politik yang diwariskan daripada kecakapan personal, yang mereduksi prinsip meritokrasi sebagai jantung administrasi publik.

Penerapan politik dinasti tidak sekadar menggerus nilai meritokrasi, tetapi juga sarat akan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Ketika kekuasaan politik dan kontrol ekonomi terkonsentrasi di tangan satu oligark, maka muncul risiko *moral hazard* yang tinggi. Kebijakan publik yang seharusnya melayani kepentingan rakyat banyak dapat terdistorsi menjadi sarana untuk memperkaya atau mengamankan bisnis keluarga, menunjukkan bahwa *mantenere lo stato* (dalam hal ini, dinasti politik) telah mengalahkan kepentingan publik (Muhammad & Hambali, 2021). Adapun dampak dari *conflict of interest* yang mengakar secara struktural juga memantik timbulnya kesenjangan kritis (*critique gap*). Sehingga kehadiran dinasti politik dianggap menciptakan struktur kekuatan yang hampir monolitik. Oposisi internal dan eksternal melemah karena enggan menghadapi kekuatan terkoordinasi dari oligark yang mencakup sektor eksekutif, legislatif, dan bahkan aparat penegak hukum. Hal tersebut menghambat kritik secara konstruktif, yang mana menjadi esensi dari diskursus politik dalam demokrasi yang sehat.

Dari perspektif hukum, fenomena dinasti politik di Indonesia menghadapi dilema akut dari sisi regulasi (Dedi, 2022). Secara filosofis, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih (*ius honorum*), termasuk anggota keluarga pejabat. Namun, hukum positif berupaya memitigasi dampak buruk dinasti politik dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar pemikiran prismatic (Muqsith, 2022). Regulasi yang pernah ada (seperti larangan kerabat maju dalam pilkada) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan melanggar hak asasi untuk berpolitik. Keputusan ini menegaskan batas antara moralitas dan legalitas. Dinasti politik mungkin dianggap tidak etis atau tidak ideal, tetapi secara *legal* diperbolehkan selama memenuhi prosedur yang ditetapkan. Realitas hukum ini kembali mengonfirmasi logika Machiavelli bahwa, jika kekuasaan dapat diperoleh secara legal melalui celah regulasi sekalipun (*fortuna*), maka *virtù* oligark akan diinvestasikan sepenuhnya untuk memanfaatkan celah tersebut. Tindakan yang dianggap amoral (perpetuasi kekuasaan dinasti) dilegitimasi oleh hukum formal. Tantangan hukum di masa mendatang terletak pada bagaimana menciptakan regulasi yang memperkuat sistem meritokrasi, transparansi dalam hal pendanaan kampanye, dan pengawasan birokrasi tanpa melanggar hak-hak dasar politik individu.

Machiavelli menekankan bahwa tujuan akhir kekuasaan adalah stabilitas. Ironisnya, dinasti politik yang awalnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas melalui model oligark (melalui *virtù* dan *fortuna*) justru berpotensi menciptakan ketidakstabilan sistem dalam jangka panjang bagi demokrasi negara. Ketika masyarakat merasa bahwa proses politik telah tertutup dan diatur untuk kepentingan elit tertentu, hal ini dapat memicu apatisme atau dalam kasus ekstrem berujung pemberontakan (demonstrasi). Kekuasaan yang dipertahankan melalui tindakan manipulatif (aplikasi buruk dari *virtù* Machiavellian) pada akhirnya akan kehilangan legitimasi moral. Stabilitas sejati dalam pandangan filosofis yang lebih tinggi harus berakar pada keadilan dan kedaulatan hukum (*the rule of law*), bukan pada *the rule of man* yang didikte oleh *necessità* suatu dinasti. Oleh karena itu, jika praktik Machiavellianisme dipertahankan tanpa kontrol etis-hukum, logika instrumental kekuasaan akan berbalik melawan dirinya sendiri, merusak kepercayaan sosial, dan pada akhirnya membahayakan stabilitas negara yang sangat diagungkan oleh Machiavelli.

SIMPULAN

Realisme politik Machiavelli menyediakan kerangka yang tak terhindarkan untuk menganalisis dinasti politik di Indonesia. Dengan pandangan pesimistik terhadap hakikat manusia dan deklarasi otonomi politik, Machiavelli menawarkan pembenaran filosofis bagi setiap tindakan yang bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, termasuk praktik suksesi oligarki. Dinasti politik menjadi manifestasi kontemporer dari pemanfaatan *virtù* suatu golongan (modalitas politik, jaringan, dan kecakapan instrumental) untuk mengeksploitasi *fortuna* secara struktural (celah regulasi dan momentum elektoral). Instrumentalitas kekuasaan yang terjadi telah mereduksi jabatan publik menjadi komoditas warisan dan alat perpetuasi kekuasaan yang secara prosedural sah, tetapi secara etika konvensional

pada demokrasi bersifat problematik. Meskipun Machiavelli berfokus pada stabilitas, dominasi Machiavellianisme yang berlebihan tanpa pengawasan etis dapat mengarah pada degenerasi demokrasi, erosi meritokrasi, dan hilangnya kepercayaan publik, yang pada akhirnya justru mengancam stabilitas sistem itu sendiri. Dalam penelitian mendatang, diperlukan elaborasi yang lebih mendalam terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama hukum konstitusi dapat menyeimbangkan antara hak asasi politik secara individu dengan kepentingan publik yang lebih luas dalam menjaga sistem meritokrasi dari ancaman dinasti politik. Selain itu, diperlukan analisis *virtù* yang lebih komprehensif, memisahkan kecakapan teknis dari modalitas politik secara intrinsik yang diwariskan, guna membedakan antara kepemimpinan sejati yang kompeten dengan kepemimpinan yang hanya mewarisi peluang.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Firdaus. (2024). Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 636-665. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art7>.
- Atu, Laurentius Florido. (2024). Pembacaan Pragmatisme Machiavelli atas Fenomena Propaganda Politik Pasca Kebenaran di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 23(2), 27-36. doi:10.31385/jakad.v23i2.25.
- Budi, Konstantinus. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1267-1274.
- Dedi, Agus. (2022). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92-101.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1-17.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488-502. doi:10.1177/0192512117697475.
- Haliim, Wimmy., & Hakim, Andy Ilman. (2020). Dinasti Politik: Basis Politik dan Kepuasan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 258-273.
- Machiavelli, Niccolo. (1991). *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*. Edisi Terjemahan: Cetakan Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad, NA, & Hambali, RYA. (2021). Kejujuran dan Etika dalam Konsep Politik Machiavelli. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 57-73.
- Muqsith, M. A., Muzykant, V. L., Tayibnapis, R. G., & Pratomo, R. R. (2022). Revolutionizing Pancasila as the ideology of Indonesians. *RUDN Journal of Sociology*, 22(4), 860-871. doi:10.22363/2313-2272-2022-22-4-860-871.
- Vano, Matias Patriano. (2024). Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 407-418. doi:10.21009/jimd.v23i2.45182.

- Rambe, Raidong Habibi. (2008). Kajian Kritis Konsep Politik Niccolo Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Susanti, Martien Herna. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.
- Rahma, Alvina Alya, dkk. (2023). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260-2269.
- Parto, Hilarion Gerri., Nadila, Yuita., & Wijanarko, Robertus. (2025). Politik Dinasti dan Tantangan Demokrasi: Kajian Filosofis Machiavelli dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL)*, 9(1), 22-43. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1543>.
- Tanuri, T., Maskur, Asep., & Alba, Subhan. (2024). Dinasti Politik: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 62-76. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i1.10428>.
- Suhartini, SP., Pitri Anggraeni., Anggia Rahmadani., & Mohammad Alvi Pratama. (2025). Machiavelli dan Demokrasi: Perspektif Kekuasaan dan Kepemimpinan dalam Negara Republik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3 (2). Diperoleh dari <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/900>.